



DINAS KOMUNIKASI INFOMATIKA
DAN PERSANDIAN

FRIENDS
INFORMATION
SEARCH
DATA
RADIO
MOBILE
GLOBAL
BLOG

Pandemi memberi ruang untuk terus maju dan melayani,
mengukur prestasi tingkatan kinerja



LAPORAN KINERJA TAHUN 2022



LAPORAN KINERJA 2022

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Disusun dan diterbitkan oleh Tim Penyusun LKjIP
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian ©2023

TIM PENYUSUN



Pembina/Pengarah:
Drs. Andi Amran, M.Si
Plt. Kepala Dinas

Ketua:
Andi Muslam, S.Sos., M.Si
Sekretaris Dinas

Sekretaris (Penulis Utama)
Suriani, S.Sos

Anggota:

Editor:
Rafiqqa, SE
Marlinda, SE., M.Si
Ahmad Husain M, S.Sos., M.Ikom
Ichsan Ashari, S.Sos
Aksa, S.Hut., M.Si
Rohani

Kontributor:
Nirwana, S.Sos
Erwin, S.H.
Awal Rahmat Amal
A. Saddang Rahmat H.

Desain Grafis:
Suriani, S.Sos

Penyusun mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Aparat Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab. Bone, Inspektorat Kabupaten Bone, Bagian Organisasi Setda Kab. Bone, Bappeda Kab. Bone, BKAD Kab. Bone dan seluruh pihak yang telah mendukung, menyumbangkan tenaga, pikiran, kreativitas dan keahliannya dalam proses penyusunan Laporan Kinerja ini.

Dokumen digital SK Tim Penyusun
LKjIP ini dapat diakses dengan
memindai QR code di samping



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Sejahtera.

Segala puji kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan karunia-nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Tahun 2022 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Kominfo yang telah dilakukan melalui pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022.

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone menyajikan hasil capaian kinerja Dinas Kominfo tahun 2022 berdasarkan realisasi dan capaian target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kominfo Kabupaten Bone Tahun 2022. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi atas kinerja Dinas Kominfo Kabupaten Bone yang terukur kepada Pimpinan khususnya Bupati Bone atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan untuk meningkatkan kinerja Dinas Kominfo pada masa yang akan datang. Apresiasi diberikan atas kerja seluruh aparat Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone selama tahun 2022 meski di tengah pandemi Covid-19.

Bapak Presiden mengingatkan tantangan pandemi Covid-19 ini jangan menjadi faktor yang membuat kita mundur, khawatir dan takut berlebihan. Tetapi justru Covid-19 ini menjadi satu titik loncatan baru, loncatan raksasa. Hal ini senada dengan harapan Bupati Bone Dr. H. A. Fahsar Mahdin Padjalangi, M. Si agar seluruh aparat Pemerintah Kabupaten Bone harus tetap berupaya semaksimal mungkin meningkatkan kinerja Organisasinya masing untuk mewujudkan "Masyarakat Bone Mabessa (Mandiri, Berdayasaing dan Sejahtera)".

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone mengemban tanggung jawab untuk menjadikan Kabupaten Bone terkoneksi melalui digitalisasi agar semakin maju. Hal itu dapat dilakukan dengan menyediakan infrastruktur telekomunikasi dan informatika untuk membantu masyarakat melewati pandemi. Dinas Kominfo menargetkan Kabupaten Bone terkoneksi jaringan dengan membangun infrastruktur telekomunikasi merata di seluruh Organisasi Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2023.



SEKILAS TENTANG LKJIP

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui alat pertanggungjawaban secara periodik yang disebut dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama setahun anggaran. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil. Hal yang paling utama untuk diinformasikan dalam LKjIP adalah yang mencakup capaian kinerja tahun berjalan yang merupakan perbandingan antara realisasi dengan rencana tahun tersebut.



Saat ini kehidupan kemasyarakatan, sosial dan ekonomi sangat bergantung pada tersedianya infrastruktur telekomunikasi dan informatika. Saat ini kita berada di masa kebangkitan dari pandemi yang telah berlangsung selama kurang lebih 4 tahun. Meskipun pandemi telah berangsur pulih, namun kita harus tetap waspada untuk mencegah penularan virus covid-19. Dinas Kominfo merupakan unsur yang sangat berperan dalam mewujudkan Program Presiden untuk meningkatkan internet-link ratio di Indonesia, untuk memperkecil digital divide, sebagai salah satu agenda utama Kementerian Kominfo. Hal ini menjadi tugas besar bagi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone sebagai salah satu jajaran Kementerian Kominfo untuk mempercepat target Indonesia terkoneksi selama pandemi.

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone ini disusun sebagai media untuk menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja Dinas Kominfo dan diharapkan juga dapat menjadi sumber informasi bagi semua pemangku kepentingan dan masyarakat umum. Segala pencapaian dan kekurangan dalam hal kinerja yang terangkum dalam laporan ini akan menjadi bahan evaluasi bagi seluruh jajaran di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone.

Pada akhirnya terima kasih yang tak terhingga untuk seluruh pejabat dan staf Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone atas kerjasamanya dan apresiasinya dalam pencapaian seluruh target yang telah ditetapkan.

Watampone, 23 Januari 2023
Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Drs. ANDI AMRAN, M.Si.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19681122198908 1001



PENDAHULUAN

01

- 2 UMUM
- 2 ORGANISASI
- 2 ISU STRATEGIS
- 2 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

PERENCANAAN KINERJA

- 2 TUJUAN DAN SASARAN
- 2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- 2 INDIKATOR KINERJA UTAMA
- 2 PERJANJIAN KINERJA
- 2 STANDAR PENILAIAN

02





AKUNTABILITAS KINERJA

03

2 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

2 REALISASI ANGGARAN

PENUTUP

04

2 SIMPULAN UMUM

2 KENDALA PELAKSANAAN DAN UPAYA MENGATASI



LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Matriks Tujuan dan Sasaran Renstra Pokok 2018-2023	23
Tabel 2.2 Matriks Tujuan dan Sasaran Renstra Perubahan 2018-2023	23
Tabel 2.3 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Renstra Perubahan 2018-2023	
Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Tahun 2019-2022	
Tabel 2.5 Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Tahun 2021-2023	
Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Tahun 2022	
Tabel 3.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022	
Tabel 3.2 Realisasi Kinerja Tahun 2018-2020	
Tabel 3.3 Realisasi Kinerja Tahun 2021-2022	
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Renstra 2018-2023	
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Standar Pelayanan Minimal/Target Nasional Lainnya	
Tabel 3.6 Ikhtisar Pencapaian Capaian Kinerja	
Tabel 3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	
Tabel 3.8 Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja	
Tabel 3.9 Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Tahun 2022	



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	23
Gambar 2 Klasifikasi ASN Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Berdasarkan Tingkat Pendidikan	23
Gambar 3 Klasifikasi ASN Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Berdasarkan Pangkat dan Golongan	
Gambar 4 Klasifikasi ASN Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Berdasarkan Eselon	
Gambar 5 Klasifikasi Tenaga Non ASN/Kontrak Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	



01

PENDAHULUAN



UMUM

ORGANISASI

ISU STRATEGIS

ASPEK STRATEGIS
ORGANISASI

Dinas Kominfo senantiasa berada di barisan depan dalam memenuhi kebutuhan Pemerintah akan jaringan di masa pandemi. Di setiap unsur terjadi perubahan sistem, Kominfo hadir menjadi solusi untuk menjawab perubahan itu. Tim yang senantiasa siap dalam melayani dan memenuhi kebutuhan OPD dan Masyarakat akan informasi

A. UMUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian yang memuat tujuan/sarasan strategis, indikator dan target kinerja dari sasaran strategis. Oleh karena itu Laporan Kinerja sangat penting guna mengukur tingkat keberhasilan Dinas Kominfo dalam melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang termuat dalam perjanjian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Tahun 2022. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Tahun 2018-2023. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.mbakarkan di sini.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone memiliki peran strategis dalam pembangunan bidang Komunikasi Informatika, menyediakan infrastruktur TIK, pengelolaan data dan statistik secara sektoral, keamanan informasi dan persandian serta menyebarluaskan informasi di Kabupaten Bone melalui berbagai media. Pelaksanaan ketiga



Bidang urusan yakni Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian tersebut dilandaskan Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (good governance) yang memiliki 3 (tiga) landasan utama yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. transparansi dalam hal ini merupakan suatu keterbukaandalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Akuntabilitas sendiri merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk

mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan partisipatif diartikan sebagai keikutsertaan setiap individu yang terdapat dalam organisasi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis organisasi.

Laporan Kinerja ini disusun dengan mengacu pada 3 (tiga) ketentuan Peraturan Perundang-undangan yaitu:

- 1.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 2.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah.

Selain mengacu pada ketentuan di atas, penyusunan LKjIP ini berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 serta dokumen perencanaan turunannya.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

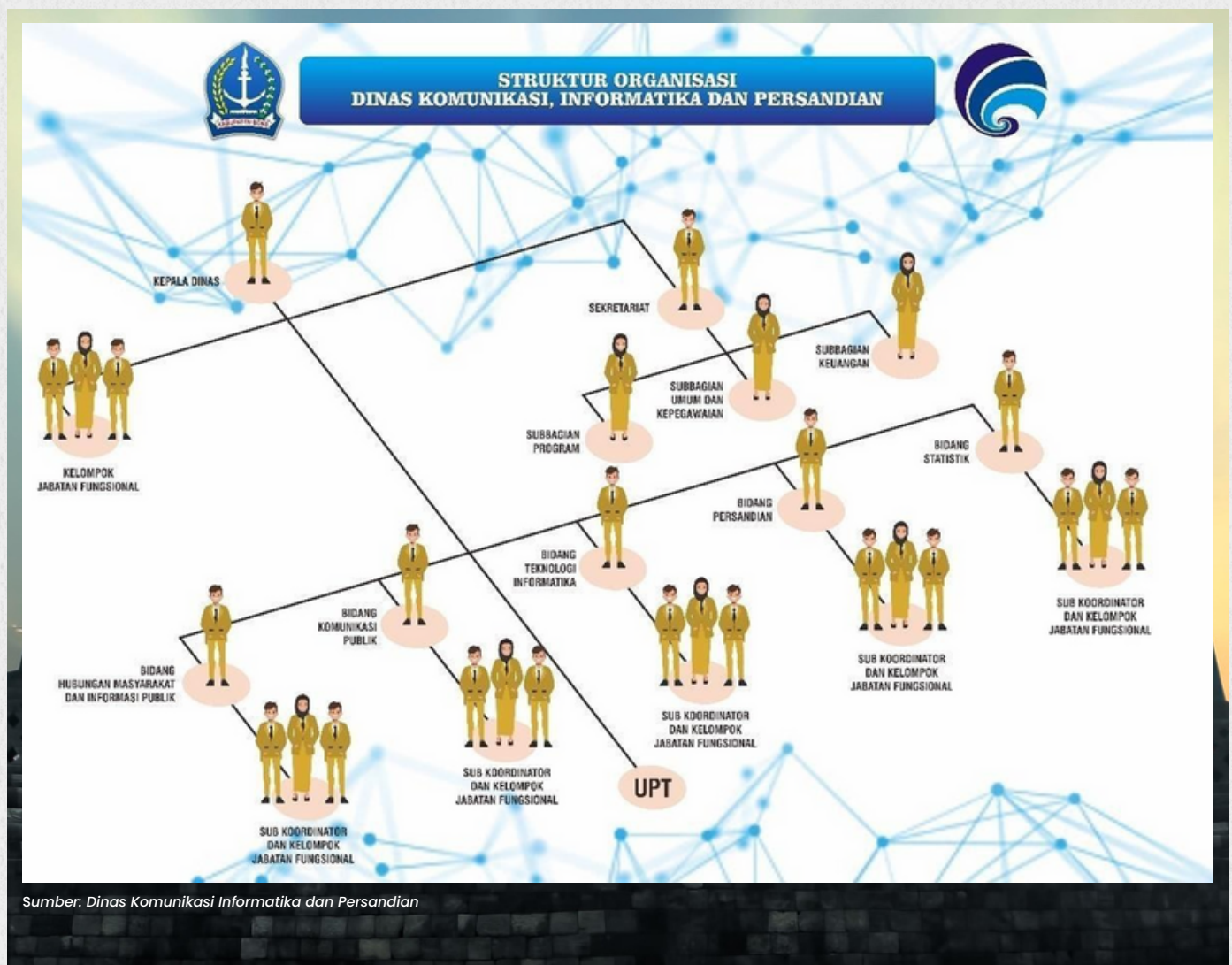
- 1.Memberikan informasi kinerja yang terukur serta mewujudkan akuntabilitas Instansi Pemerintah kepada pihak pemberi mandat/amanat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- 2.Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian selama tahun 2022 dalam rangka melaksanakan Visi dan Misi yang tertuang dalam RPJMD Perubahan Kabupaten Bone Tahun 2018-2023;
- 3.Sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian untuk meningkatkan kinerjanya. Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar penyusunan beberapa rekomendasi untuk menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Unit Kerja pada tahun-tahun mendatang.

B. ORGANISASI

Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 81 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone, struktur organisasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dapat dilihat pada bagan berikut:

Gambar 1
Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian



Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kabupaten Bone yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 81 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2021 susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone terdiri dari:

- Kepala Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah;
- Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas koordinasi di bidang kesekretariatan yang menjadi tanggungjawab kedinasan yang terdiri dari Sub Bagian Program, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta Sub Bagian Keuangan;
- Bidang Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik yang terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- Bidang Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis bidang komunikasi publik yang terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- Bidang Teknologi Informatika dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang teknologi informatika yang terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- Bidang Persandian dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang persandian yang terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- Bidang Statistik dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang statistik yang terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.



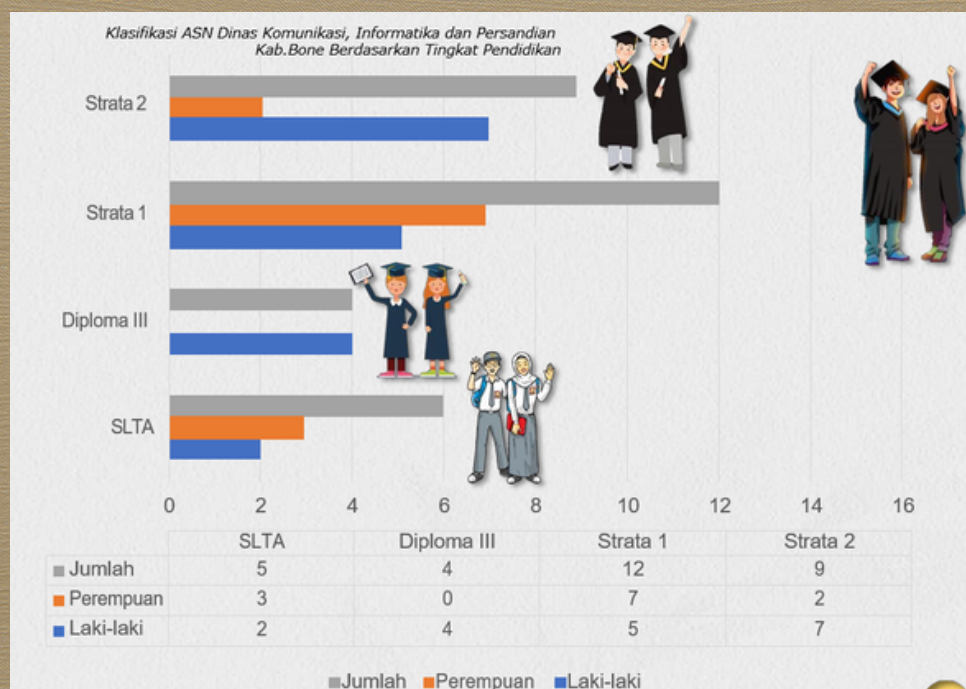
Scan QR Code untuk
melihat dokumen
Peraturan Bupati Bone
Nomor 81 Tahun 2021

Efektifitas dan Efisiensi pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone, disamping ditentukan oleh kemantapan sistem, mekanisme, tata cara pelaksanaan, dan pengelolaan Teknologi Informasi, Komunikasi, Statistik dan Persandian, juga sangat ditentukan oleh Sumber Daya Aparatur yang secara signifikan akan menentukan kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone.

JUMLAH TOTAL PEGAWAI Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone per 31 Desember 2022 adalah 66 pegawai yang terdiri dari 30 pegawai ASN dan 36 pegawai Non ASN. Seluruh pegawai tersebut tersebar ke Sekreatariat Dinas dan 5 Bidang Teknis. yang mengampu 3 (tiga) urusan pemerintahan yakni komunikasi informatika, statistik, dan persandian. Keadaan pegawai pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian terbagi ke dalam beberapa aspek.

Dari jumlah total pegawai pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone, sebenarnya keadaan ini sangat tidak proporsional. Hal ini terjadi karena jumlah sebaran ASN yang tidak memadai di setiap unit kerja. Ada beberapa unit kerja yang tidak memiliki staf ASN, diantaranya Sub Bagian Program dan Sub Bagian Keuangan Sekretariat Dinas, sementara 4 Bidang hanya memiliki masing-masing 1 orang staf. Hanya Bidang Persandian yang memiliki 6 orang staf.

Gambar 2
Klasifikasi ASN Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian berdasarkan Tingkat Pendidikan

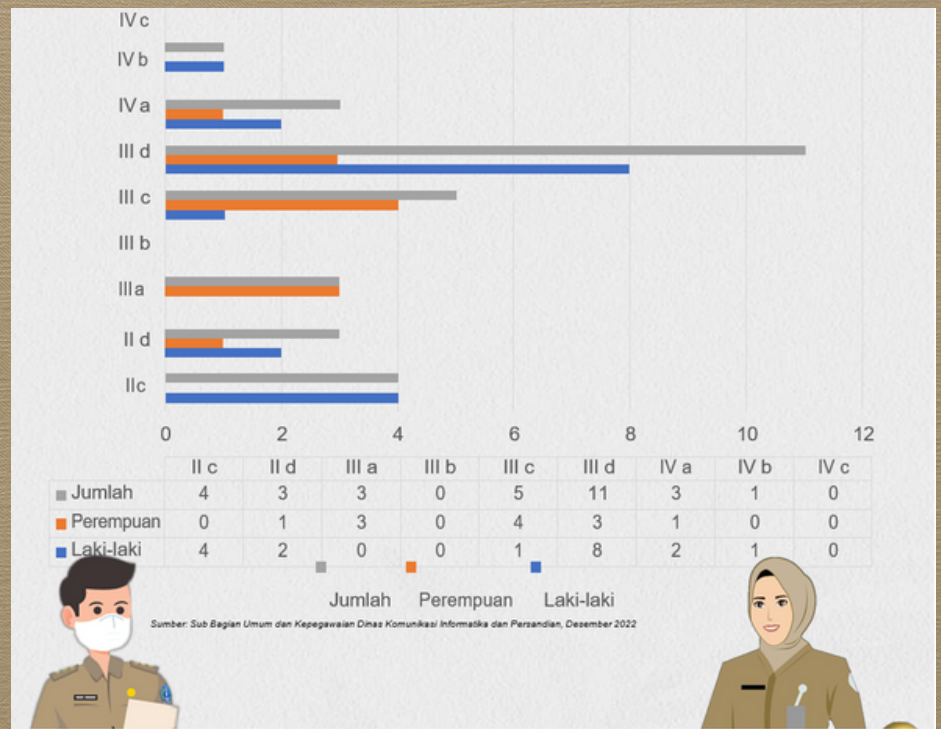


Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone didukung oleh 30 (Tiga puluh) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri atas 8 orang Pascasarjana (S2), 13 orang berpendidikan Sarjana (S1), 4 orang Diploma III (DIII), dan 5 orang Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).

Gambar 3
Klasifikasi ASN Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian berdasarkan Pangkat dan Golongan

Berdasarkan pangkat dan golongan, ASN yang tergabung pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian terdiri atas 4 orang Golongan IV (1 orang Golongan IV/b dan 3 orang Golongan IV/a), 19 orang Golongan III (10 orang Golongan III/d, 6 Orang Golongan III/c, dan 3 orang Golongan III/a), dan 7 orang Golongan II (2 Orang Golongan II/d dan 5 orang Golongan II/c).



Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

Gambar 4
Klasifikasi ASN Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian berdasarkan Pangkat dan Golongan



Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

Berdasarkan tingkat Jabatan/ Eselon Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tergabung dalam Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri atas 1 Orang Eselon III.a, 3 Orang Eselon III.b, 3 Orang Eselon IV.a, 14 Orang Fungsional tertentu 9 Orang Staf.

Pada gambar dapat dilihat bahwa terjadi kekosongan pada jabatan Kepala Dinas, hal ini disebabkan karena adanya mutasi dan jabatan tersebut nantinya akan diisi melalui lelang jabatan. Selain jabatan kepala dinas, juga terdapat 2 Kepala Bidang yang lowong karena pejabat sebelumnya telah memasuki masa purna bakti.

Gambar 5
Klasifikasi ASN Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian berdasarkan Pangkat dan Golongan

Selain Aparatur Sipil Negara (ASN) terdapat 36 (Tiga puluh enam) orang Tenaga Non ASN atau Tenaga Kontrak yang dipekerjakan untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi dan fungsional umum lainnya



Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

C. ISU STRATEGIS

Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone perlu berkoordinasi dan membangun kerjasama yang sinergis dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang bertujuan mengidentifikasi isu strategis serta faktor-faktor yang mempengaruhi isu yang ada pada setiap bidang berdasarkan tugas dan fungsinya. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab.Bone membidangi 3 (Urusan) Bidang Urusan Wajib non Pelayanan Dasar yaitu Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian yang diampu oleh 5 (lima) Bidang yaitu Bidang Komunikasi Publik, Bidang Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik, Bidang Teknologi Informasi, Bidang Statistik dan Bidang Persandian.

Adapun isu-isu strategis urusan komunikasi informatika, statistik, dan persandian yaitu:

URUSAN KOMUNIKASI INFORMATIKA

- Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone terbentuk pada tanggal 1 Januari 2017 berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 76 Tahun 2016. Ini menunjukkan bahwa Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten masih tergolong baru. Hal tersebut menyebabkan masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung khususnya fasilitas teknologi informatika dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Sejak WHO (World Health Organization atau Badan Kesehatan Dunia) mendeklarasikan Corona Virus Disease-19 (Covid-19) sebagai pandemic pada tanggal 9 Maret 2020 dan di Indonesia ditemukan kasus pertama pada 2 Maret 2020. Hal ini pastinya sangat berpengaruh pada seluruh aspek kehidupan seperti Perekonomian, Pemerintahan, Sosial, Kesehatan, dan Pendidikan. Hal ini merupakan tantangan besar Bagi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian sebagai OPD yang mengampu 3 (tiga) urusan yakni Komunikasi Informatika, Statistik, dan Persandian. Sejak covid-19 menyebar di Indonesia, maka pemerintah memberlakukan pembatasan pada seluruh aktivitas masyarakat. Pegawai dan karyawan bekerja dari rumah dan seluruh sekolah dan perguruan tinggi diharuskan untuk belajar on-line, seluruh pertemuan dan rapat dilaksanakan melalui system zoom meeting. Hal ini tentu bukan tanpa halangan, dengan adanya hal tersebut Dinas Kominfo harus berupaya keras untuk menyiapkan kapasitas bandwidth yang berkualitas serta sarana dan prasarana yang memadai untuk membackup pelaksanaan zoom meeting dan video conference;
- Dimasa pandemi seperti saat dimana selama kurang lebih 2 tahun terakhir segala aktivitas pemerintahan sangat mengandalkan teknologi informatika berbanding terbalik dengan sumber daya aparatur khususnya terkait dengan pengelola teknologi informatika yang belum memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Hal ini tentu membutuhkan kerja lebih bagi aparat Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian saat harus menghandle beberapa kegiatan baik itu zoom meeting maupun videoconference pada waktu yang bersamaan;
- Dengan luas wilayah terbesar ketiga di Sulawesi Selatan, terdapat beberapa wilayah masih memiliki area yang blank spot yang belum terjangkau jaringan seluler yang tersebar di beberapa Kecamatan;
- Kondisi geografis Kabupaten Bone, merupakan kabupaten dengan wilayah otonom terluas ketiga di Sulawesi Selatan. Luas wilayah Kabupaten Bone sekitar 4.559 km2 persegi, dengan jumlah penduduk 812.842 jiwa dan rata-rata tingkat kepadatan penduduk adalah 157 jiwa per km2. Sebaran penduduk yang tidak merata dan jarak antar pusat pemerintahan kabupaten, kecamatan dan desa berpotensi menjadi penyebab komunikasi tidak efektif. Meski tak dapat dipungkiri bahwa modernisasi teknologi komunikasi informasi secara umum bisamenjadi solusi. Namun, di beberapawilayah yang memiliki keterbatasan infrastruktur teknologi komunikasi yang masih minim, tentunya solusi tersebut tidak berlaku lagi. Di perlukan metode publikasi yang terintegrasi dengan pendekatan komunikasipublik seperti melalui pengumuman di Radio, kelompok dan simpul-simpul sosial kemasyarakatan, atau melalui media below the line seperti spanduk, baliho, poster dan lain-lain. Berdasarkan hal tersebut di atas untuk pemenuhan aspek komunikasi pemerintahan yang efeektif tentunya dibutuhkan supporting system yang lengkap. Mulai dari anggaran yang memadai, ketersediaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang menguasai bidang tugas yang diemban;
- Belum memadainya infrastruktur jaringan sehingga perlu adanya Kerjasama dengan Kementerian dan Provinsi serta Mitra swasta untuk membangun BTS;
- Masih adanya beberapa Kecamatan yang tidak terjangkau layanan internet atau bandwidth yang disediakan Pemerintah sehingga Masyarakat kesulitan dalam berkomunikasi dan menerima Informasi berbasis IT.



ARTIKEL, BERITA

Pemerintah Kabupaten Bone menjalin kerjasama dengan pihak ITS

14 Februari 2023

Sumber: Website Resmi Pemerintah Kabupaten Bone

URUSAN STATISTIK

- Belum adanya data yang akurat, Valid dan relevan serta up to date yang dapat mendukung terwujudnya kualitas produk perencanaan yang baik;
- Relatif rendahnya kualitas sumber daya manusia pengumpul, pengolah dan penyaji laporan/data dilihat dari kualifikasi pendidikan formal;
- Relatif rendahnya kualitas sumber daya manusia manusia pengumpul, pengolah dan penyaji laporan/data dilihat dari kemampuan teknis perencanaan;
- Masih kurang sinergisnya koordinasi antar SKPD terkait dengan proses pengumpulan, pengolahan dan pemanfaatan data statistik dalam proses perencanaan.

URUSAN PERSANDIAN

- Belum adanya Peralatan dan Tenaga Pengelola Persandian yang memadai;
- Pengalokasian anggaran yang terbatas sehingga sangat sulit bagi Perangkat Daerah khususnya Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian untuk melakukan inovasi terkait dengan pengembangan Teknologi Informasi yang notabene membutuhkan dana yang cukup besar.

Isu-isu tersebut berpotensi menghambat laju Pemerintahan Kabupaten Bone dalam melakukan penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan informasi publik guna mewujudkan keterbukaan informasi publik serta dapat menghambat proses reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan pemerintahan yang efisien melalui pemanfaatan TIK. Konsekuensi logis dari hal ini yakni, akan berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023. Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone adalah bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat akan Informasi, karena memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia individu atau masyarakat, sesuai Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28, yang berbunyi: "Setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia". Berdasarkan amanat Undang-Undang tersebut di atas, maka Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki kewajiban untuk memenuhi hak dasar publik untuk memperoleh Informasi.

D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dalam Rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan informasi maka pemerintah, khususnya Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone menetapkan berbagai program, strategi, arah kebijakan dan kegiatan secara tepat, responsive dan adaptif sesuai harapan dan kebutuhan masyarakat. Namun yang menjadi permasalahan utama Pemerintah Kabupaten Bone adalah bagaimana Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone khususnya menyangkut penyediaan Sarana dan Prasarana (Infrastruktur) teknologi Informasi. Selain itu, perlunya menetapkan kembali regulasi yang berkenaan dengan teknologi Informasi guna mendukung pemerataan akses data dan informasi di berbagai sektor.

Selanjutnya bagaimana mendorong inovasi-inovasi baru di bidang TIK yang ramah lingkungan dan berdaya saing tinggi, melalui upaya-upaya tersebut diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone dalam memberikan pelayanan informasi yang lebih baik kepada Organisasi Perangkat Daerah pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Hal ini diharapkan akan dapat menjadi stimulasi dan kekuatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone dalam peningkatan TIK menuju Bone yang lebih baik.

Upaya lain yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dalam memenuhi kebutuhan OPD dan masyarakat akan akses internet yang berkualitas yaitu:

- Bekerjasama dengan pihak penyedia jaringan bandwidth untuk membangun jaringan internet ke seluruh OPD sampai yang akan tuntas pada tahun 2023 mendatang. Selain itu, dibangun juga titik free Wi-fi di area-area publik yang ramai pengunjung;
- Membangun inovasi SDDK untuk memenuhi kebutuhan OPD dan masyarakat akan informasi statistik sektoral yang saat telah bertransformasi menjadi aplikasi berbasis android;
- Berupaya untuk memperoleh aliran Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian Kominfo yang nantinya akan digunakan untuk mengadakan sarana dan prasarana pendukung berupa peralatan teknologi informatika dan peralatan persandian yang memadai.

02 PERENCANAAN KINERJA



Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2022

PERJANJIAN KINERJA

adalah dokumen yang berisikan komitmen antara pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja dan merupakan wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.

**TUJUAN DAN
SASARAN**

**STRATEGI DAN ARAH
KEBIAJAKAN**

**INDIKATOR
KINERJA
UTAMA**

**PERJANJIAN
KINERJA**

**STANDAR PENILAIAN
KINERJA**

A. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran pembangunan menurut misi merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan wajib dan pilihan dalam mendukung pelaksanaan visi pembangunan daerah. Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya Bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik tujuan dan sasaran terdapat pada misi ke 1 (Pertama) yaitu Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan Misi ke-5 (lima) yaitu Mendorong Penciptaan Iklim Investasi yang kondusif untuk Pengembangan Usaha dan Mengembangkan Inovasi Daerah dalam Peningkatan Pelayanan Publik. Untuk mewujudkan Visi Misi yang diinginkan, Perlu ditetapkan tujuan yang mengarah pada titik sasaran yang akan di capai dengan tetap mengacu pada pernyataan Visi dan Misi Bupati Terpilih serta dengan memperhatikan isu-isu strategis. Adapun tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabuapten Bone yaitu "Meningkatkan Implementasi Teknologi Informasi dalam Menjaga Keamanan Data Komunikasi dan Penyebaran Luasan Informasi".

Atas dasar tujuan yang diinginkan tersebut, maka ditetapkan 5 (lima) sasaran yang akan dituju oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian tahun 2018-2023 yang dirumuskan melalui bagan di samping



Tabel 2.1
Matriks Tujuan dan Sasaran Renstra Pokok 2018-2023

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			2019	2020
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Urusan Komunikasi Informatika dan Persandian	Predikat Hasil Evaluasi SAKIP Oleh APIP	CC	CC
2	Meningkatnya Akses Layanan Informasi dan Aspirasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Media/ Saluran Informasi yang efektif • Persentase Pemenuhan Data dan Informasi Publik • Jumlah Konten Informasi di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan yang dipublikasikan • Persentase Aspirasi/Aduan yang ditindak lanjuti 	<ul style="list-style-type: none"> • 100% • 100% • 100% • 100% 	<ul style="list-style-type: none"> • 100% • 100% • 100% • 100%
3	Meningkatnya Kualitas Layanan E- Government	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Layanan Publik yang dapat diakses secara Online • Persentase E-Government yang terintegrasi 	<ul style="list-style-type: none"> • 58% • 46% 	<ul style="list-style-type: none"> • 75% • 61%
4	Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Daerah	Persentase Dokumen Statistik Daerah Dinis Tepat Waktu	80%	90%
5	Meningkatnya Keamanan Data Komunikasi Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan Sandi Pengamanan Data Komunikasi	100%	100%

Kelima sasaran di atas dapat dilihat dalam tabel berikut, tapi sebelumnya kita lihat tabel matriks sasaran Renstra Tahun 2018-2023 di samping.

Tabel 2.2
Matriks Tujuan dan Sasaran Renstra Perubahan 2018-2023

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Predikat Hasil Evaluasi SAKIP Oleh APIP			BB	BB	A
2	Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Informasi dan Aspirasi Publik	Persentase Layanan Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian			85%	100%	100%
3	Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan E-government	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang Terhubung dengan Akses Internet yang disediakan Oleh Dinas Kominfo			70%	75%	85%
4	Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik sektoral	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah			100%	100%	100%
5	Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)			525	584	600

Sumber Data: Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Tahun 2022

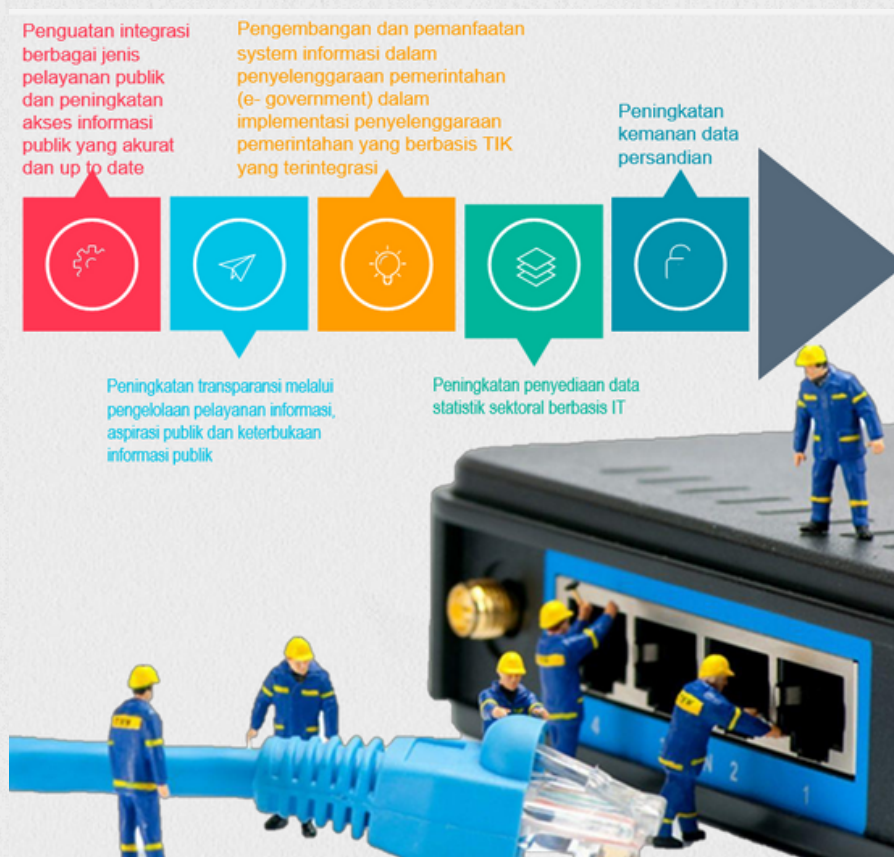


Renstra Perubahan
Diskominfo Tahun
2018-2023
(Pemutakhiran
Keppmendagri 050-
5889) Tahun 2021

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone melakukan berbagai strategi, kebijakan dan program. Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan strategik, yang meliputi penetapan program dan serangkaian kegiatan dengan memperhatikan segala sumberdaya dan lingkungan yang ada. Adapun strategi yang dilaksanakan dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone tertuang dalam bagan di samping



Arah Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam mengembangkan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan sinergisitas dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi organisasi. Adapun arah kebijakan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian tertuang dalam bagan di samping.

Berdasarkan bagan-bagan di atas, maka Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 yang ditarik dari visi misi RPJMD Perubahan Kabupaten Bone dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Renstra Perubahan 2018–2023

VISI	Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera			
Misi I	Meningkatkan Tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)			
	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatkan Implementasi Teknologi Informasi dalam Menjaga Keamanan Data Komunikasi dan Penyebarluasan Informasi	Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya	Penguatan integrasi berbagai jenis pelayanan publik dan peningkatan akses informasi publik yang akurat dan up to date
Misi II	Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik			
	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatkan Implementasi Teknologi Informasi dalam Menjaga Keamanan Data Komunikasi dan Penyebarluasan Informasi	Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Informasi dan Aspirasi Publik	Meningkatkan keterbukaan dan akses masyarakat terhadap informasi dan aspirasi publik	Peningkatan transparansi melalui pengelolaan pelayanan informasi, aspirasi publik dan keterbukaan informasi publik
		Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan E-Government	Mengembangkan dan memanfaatkan system informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (e-government)	Pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (e-government) dalam implementasi penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis TIK yang terintegrasi
		Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektor	Meningkatkan data statistik sektoral dan sistem sarana prasarana penyediaan data statistik sektoral	Peningkatan penyediaan data statistik sektoral berbasis IT
		Meningkatnya Keamanan Informasi	Mengembangkan dan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan persandian	Peningkatan keamanan data persandian

Sumber Data: Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran atau indikator kinerja Organisasi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Oleh karena itu, wajib hukumnya setiap OPD merumuskan dan menetapkan Indikator Kinerja Utama. Dinas Komunikasi,

Informatika dan Persandian Kabupaten Bone telah merumuskan Indikator Kinerja Utama dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Noor 36 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Kabupaten Bone Tahun 2018-2023. Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah, kemudian ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bone Nomor 101 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bone Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone.

Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
Tahun 2019-2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	
			2019	2020
1	Meningkatnya Akses Layanan Informasi dan Aspirasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatkan Akses Layanan Informasi dan Aspirasi Publik ▪ Persentase Pemenuhan Data dan Informasi Publik ▪ Jumlah Konten Informasi di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan yang dipublikasikan ▪ Persentase Aspirasi/Aduanyang ditindak lanjuti 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 100% ▪ 100% 100% ▪ 100% 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 100% ▪ 100% 100% ▪ 100%
2	Meningkatnya Kualitas Layanan E-Government	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persentase Layanan Publik yang dapat diakses secara Online ▪ Persentase E-Government yang terintegrasi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 58% ▪ 46% 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 75% ▪ 61%
3	Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Daerah	Persentase Dokumen Statistik Daerah Dirilis Tepat Waktu	80%	90%
4	Meningkatnya Keamanan Data Komunikasi Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan Sandi Pengamanan Data Komunikasi	100%	100%

Sumber Data: Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian



Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Tahun 2021-2023

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN FORMALISASI CAPAIAN TARGET	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	TARGET		
						2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7		
1	Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	Hasil evaluasi SAKIP Oleh APIP	Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian oleh Inspektorat Kab. Bone	Sekretariat	BB	BB	A
2	Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Informasi dan Aspirasi Publik	Persentase Layanan Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Jumlah layanan publik diselenggarakan secara online dan terintegrasi -----x 100 % Jumlah layanan publik	Laporan Triwulan pada Bidang Komunikasi, dan Bidang Informasi Publik	Bidang Komunikasi Publik & Bidang Humas dan Informasi Publik	85%	100%	100%
3	Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan E-Government	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang Terhubung dengan Akses Internet yang disediakan Oleh Dinas Kominfo	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo -----x 100 % Jumlah OPD	Laporan Triwulan pada Bidang TI	Bidang Teknologi Informatika	70%	75%	85%
4	Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Persentase Organisasi Daerah (OPD) yang menggunakan Data Statistik dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan -----x 100 % Jumlah OPD	Laporan Triwulan pada Bidang Statistik	Bidang Statistik	95%	100%	100%
5	Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Jumlah nilai per area keamanan informasi -----x 100 % Jumlah area penilaian	Laporan Triwulan pada Bidang Persandian	Bidang Persandian	525	584	600

Sumber Data: Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

D. PERJANJIAN KINERJA

Scan QR Code di samping untuk melihat dokumen Perjanjian Kinerja



Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian kinerja disepakati bersama antara penerima dan pemberi amanah dan merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

Dalam perjanjian kinerja dimuat tujuan/sasaran strategis, indikator kinerja, target serta program yang dilakukan dalam mendukung pencapaian tujuan/sasaran dan pengalokasian anggaran pada masing-masing program. Uraian dari perjanjian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Tahun 2019-2020

N o.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran
1	Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP	BB	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 5.164.344.359
2	Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Informasi dan Aspirasi Publik	Persentase Layanan Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	100	Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 625.940.740
3	Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan E-Government	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang Terhubung dengan Akses Internet yang disediakan Oleh Dinas Kominfo	75	Aplikasi Informatika	Rp. 1.692.128.000
4	Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik sektoral	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	100	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 81.045.050
5	Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	584	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp. 45.785.550

Sumber Data: Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

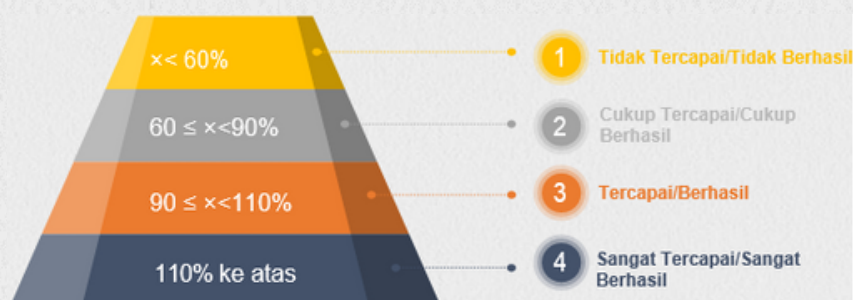
E. STANDAR PENILAIAN

Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Instansi Pemerintah.

Standar penilaian kinerja terhadap laporan kinerja perangkat daerah merupakan tolok ukur keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program, kegiatan, dan sub kegiatan. Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bone, maka telah ditetapkan standard pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut::

How To:

Adapun Skala yang digunakan terkait dengan Perhitungan Capaian Kinerja Evaluasi SAKIP, berdasarkan tingkatan yang diatur dalam permenpan 12 tahun 2015, dapat dilihat pada uraian berikut:



Keterangan	Skor
AA (Sangat Memuaskan)	7 (Tujuh)
A (Memuaskan)	6 (Enam)
BB (Sangat Baik)	5 (Lima)
B (Baik)	4 (Empat)
CC (Cukup)	3 (Tiga)
C (Kurang)	2 (dua)
D (Sangat Kurang)	1 (Satu)

Dari uraian di atas, maka setiap indikator kinerja dari sasaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, dapat dinilai tingkat keberhasilan kinerjanya berdasarkan persentase capaian target indikator kinerja yang diperoleh dari perbandingan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

03 AKUNTABILITAS KINERJA



CAPAIAN
KINERJA
ORGANISASI

REALISASI
ANGGARAN

Akuntabilitas Kinerja Adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

A. CAPAIAN ORGANISASI



Capaian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Pengukuran tersebut dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja indikator tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Capaian indikator kinerja tujuan/sasaran atas perjanjian kinerja mengacu pada tujuan/sasaran yang telah ditetapkan dalam, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Tahun 2018-2023.

Untuk setiap pernyataan kinerja tujuan/sasaran strategis tersebut di atas dilakukan analisis capaian kinerja tahun 2022 sebagai berikut:

1. TARGET DAN REALISASI KINERJA

Capaian kinerja tahun anggaran 2022 merupakan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dengan membandingkan target kinerja dan realisasi tahun 2022 sebagaimana dijelaskan melalui tabel target dan realisasi kinerja tahun 2022.

Berdasarkan data pada tabel, dari 5 (lima) tujuan/sasaran strategis terdapat 2 (dua) tujuan/sasaran dengan pencapaian mencapai target dan 3 (tiga) tujuan/sasaran yang melampaui target dengan total capaian 533,00%. Jika dirata-ratakan capaian kelima tujuan/sasaran di atas sebesar 106,60% atau berada pada predikat melampaui target.

TUJUAN >

Meningkatkan Implementasi Teknologi Informasi dalam Menjaga Keamanan Data Komunikasi dan Penyebarluasan Informasi

INDIKATOR>

Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Bidang komunikasi Informatika

Sasaran 01

Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Persandian dengan indikator: Predikat SAKIP Oleh APIP

Sasaran 02

Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Informasi dan Aspirasi Publik dengan indikator: Persentase Layanan Publik Dinas Komunikasi dan Informatika

Sasaran 03

Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan E-government dengan indikator :Persentase Organisasi Perangkat Daerah(OPD) yang terhubung dengan Akses Internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo

Sasaran 04

Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik sektoral dengan indikator: Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah

Sasaran 05

Meningkatnya Keamanan Informasi dengan indikator: Indeks Keamanan Informasi

Sumber Data: Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Ket
1	Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP	BB	*A	120,00%	Melampaui Target
2	Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Informasi dan Aspirasi Publik	Persentase Layanan Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	100	100	100%	Mencapai Target
3	Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan E- Government	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang Terhubung dengan Akses Internet yang disediakan Oleh Dinas Kominfo	75	84,62	112,83%	Melampaui Target
4	Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	100	100	100%	Mencapai Target
5	Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	584	585	100,17%	Melampaui Target
Total					533,00%	
Rata-Rata					106,60%	

Sumber Data: Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian



2. REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA 2018-2023

Perubahan Renstra berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 berdampak pada perubahan secara menyeluruh dari tujuan/sasaran, program, kegiatan yang ada pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone dan ditambah dengan Sub Kegiatan. Hal ini berakibat data realisasi kinerja tahun 2018-2020 tidak dapat dibandingkan dengan realisasi tahun 2021-2022 karena mengalami perubahan indikator. Oleh karena itu, dibuat 2 (dua) tabel perbandingan realisasi berdasarkan indikator Renstra pokok dan tabel perbandingan berdasarkan indikator Renstra Perubahan.

Tahun 2022 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Tahun 2018-2023. dan merupakan tahun ke 2 (dua) pelaksanaan Rencana Strategis Perubahan Tahun 2018-2023 sehingga realisasi tahun 2022 sudah dapat dibandingkan dengan realisasi tahun 2021.

Tabel 3.2
Realisasi Kinerja Tahun 2018-2020

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Awal 2018	Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja (%)	
			2019	2020	2019	2020
Meningkatnya Akses Layanan Informasidan Aspirasi Publik	Persentase Media/ Saluran Informasi yang efektif	100%	100%	100%	100	100
	Persentase Pemenuhan Data dan Informasi Publik	100%	100%	100%	100	100
	Jumlah Konten Informasi di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan yang dipublikasikan	100%	100%	100%	100	100
	Persentase Aspirasi/Aduanyang ditindak lanjuti	100%	100%	100%	100	100
Meningkatnya Kualitas Layanan E-Government	Persentase Layanan Publik yang dapatdi akses secara Online	100%	58%	75%	100	100
	Persentase E-Government yang terintegrasi	100%	46%	61%	100	100
Meningkatnya Pemanfaatan Data StatistikDaerah	Persentase Dokumen StatistikDaerah Dinisil Tepat Waktu	100%	80%	90%	100	100
Meningkatnya Keamanan Data KomunkasiDaerah	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan Sandi Pengamanan Data Komunikasi	100%	100%	100%	100	100
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Urusan Komunikasi Informatika dan Persandian	Predikat Hasil Evaluasi SAKIP Oleh APIP	CC	B	BB	100	100

Sumber Data: Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

Tabel 3.3
Realisasi Kinerja Tahun 2021-2022

N O	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Awal 2018	Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja (%)				
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP	CC			A	*A				120,00	120,00	
2	Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Informasi dan Aspirasi Publikasi	Persentase Layanan Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian				100	100				117,65	100,00	
3	Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan E-Government	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang Terhubung dengan Akses Internet yang disediakan Oleh Dinas Kominfo				72,73	84,62				103,90	112,83	
4	Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik sektoral	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah				100	100				105,26	100,00	
5	Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi(KAMI)				525	585				100	100,17	

Sumber Data: Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

Berdasarkan data di samping dapat dijelaskan bahwa tingkat capaian Kinerja pada tahun 2022 berada pada kisaran 100-120,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

Tujuan

Meningkatkan Implementasi Teknologi Informasi dalamMenjaga Keamanan Data Komunikasi dan Penyebarluasan Informasi

Indikator

Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Bidang komunikasi Informatika

SASARAN 1

Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Persandian

Indikator:

Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP dengan capaian kinerja **120,00%**





SASARAN 2

Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Informasi dan Aspirasi Publik

Indikator:

Persentase Layanan Publik Dinas Komunikasi dan Informatika dengan capaian kinerja **100%**



SASARAN 4

Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik sektoral



Indikator:
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah dengan capaian kinerja **100%**



SASARAN 3

Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan E-government

Indikator:

Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan Akses Internet yang disediakan Oleh Dinas Kominfo dengan capaian kinerja **112,83%**.

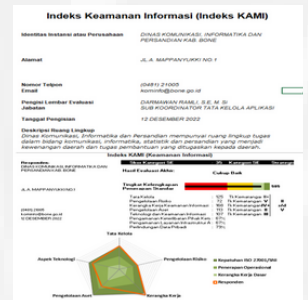


SASARAN 5

Meningkatnya Keamanan Informasi

Indikator:

Indeks Informasi capaian **100,17%** Keamanan dengan kinerja



Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa karena adanya perubahan regulasi sehingga berimbas pada perubahan Rencana Strategi OPD dengan area perubahan mulai dari tujuan/sasaran sampai dengan indikator kinerja output sehingga data yang dapat dibandingkan adalah data tahun 2019-2020 dan data tahun 2021-2022.

3. REALISASI KINERJA YANG MENGACU PADA TARGET JANGKA MENENGAH RENSTRA

Analisa berikutnyadalam mengukur capaian kinerja tujuan/sasaran adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah sebagaimana tercantum pada Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Tahun 20218-2023 seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Renstra 2018-2023

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi Kinerja	
				2022	Capaian Kinerja 2022
1	Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP	A	*A	100%
2	Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Informasi dan Aspirasi Publik	Persentase Layanan Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan E-Government	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang Terhubung dengan Akses Internet yang disediakan Oleh Dinas Kominfo	85%	84,62%	99,55%
4	Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100%	100%
5	Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	600	585	97,50%
Total Capaian					497,05%
Rata-Rata Capaian					99,41%

Sumber Data: Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 3 (tiga) sasaran yang telah mencapai target kinerja jangka menengah pada tahun ke-4 periode Renstra 2018-2023 yaitu, sasaran 1 yang diampu oleh Sekretariat Dinas, sasaran 2 yang diampu oleh Bidang Komunikasi Publik dan Bidang Humas dan Informasi Publik, dan sasaran 4 yang diampu oleh Bidang Statistik.



Sementara 2 sasaran lainnya belum mencapai target jangka menengah, namun sudah berada pada angka di atas 95% yaitu sasaran 3 Meningkatkan Akses dan Kualitas Layanan E-Government yang diampu oleh Bidang TI dengan capaian 99,55% dan sasaran 5 Meningkatkan Keamanan Informasi yang diampu oleh Bidang Persandian dengan capaian 97,50%

4. REALISASI KINERJA DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL/STANDAR NASIONAL LAINNYA

Analisa berikutnya adalah mengukur capaian kinerja tujuan/sasaran strategis dengan membandingkan realisasi kinerja indikator tujuan/sasaran strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone dengan target dan realisasi standar pelayanan minimal/standar nasional lainnya.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian bukan OPD pengampu Standar Pelayanan Minimal sehingga tidak ada target Standar Pelayanan Minimal ataupun Standar Nasional lainnya.



Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2022	Standar Nasional	
				Target 2021	Target 2022
1	Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP	*A	-	-
2	Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Publik Informasi dan Aspirasi Publik	Persentase Layanan Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	100%	-	-
3	Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan E-Government	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang Terhubung dengan Akses Internet yang disediakan Oleh Dinas Kominfo	84,62%	-	-
4	Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik sektoral	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	-	-
5	Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	585	-	-

Sumber Data: Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

5. ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indikator kinerja dalam rangka pencapaian tujuan/sasaran strategis, dapat kita lihat pada tabel ikhtisar pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.6
Ikhtisar Pencapaian Capaian Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Rata- Rata Capaian	Predikat			
				>110	90≤s/d<110	60≤s/d<90	<60
				Sangat Berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil
Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP	120,00		√			
Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Informasi dan Aspirasi Publik	Persentase Layanan Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	100,00			√		
Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan E-Government	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang Terhubung dengan Akses internet yang disediakan Oleh Dinas Kominfo	112,83		√			
Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	100			√		
Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	100,17			√		
Total Capaian		533,00	106,60		√		

Sumber Data: Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN CAPAIAN KINERJA SASARAN

Berdasarkan data pada tabel 3.6 di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum realisasi capaian indikator tujuan/sasaran strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone tahun 2022 dalam kategori Berhasil dan Sangat Berhasil. Uraian penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja dari 5 (lima) sasaran Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone dapat dilihat pada uraian berikut:

SASARAN 1

MENINGKATNYA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Sasaran 1 (satu) diampu oleh 1 (satu) indikator yaitu Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP dengan realisasi kinerja A dari target BB dalam kategori Sangat Berhasil dengan capaian **120,00%**.

FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN

1. Adanya kenaikan nilai yang signifikan mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan pencapaian kinerja yang didorong oleh adanya keselarasan dokumen dan data dukung dari seluruh komponen penilaian;
2. Pemenuhan laporan dan data dukung evaluasi yang memadai disertai dengan publikasi melalui website;
3. Peningkatan sistem pelaporan dan pencapaian kinerja program pendukung serta adanya keterlibatan pimpinan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi.

Dokumen Digital | NILAI SAKIP | 2021



Dokumentasi SAKIP dan RB AWARD 2022

FAKTOR PENGHAMBAT

Pencapaian diatas telah mencapai target, namun masih terdapat hambatan dalam pencapaiannya, yaitu:

1. Masih adanya beberapa pelaksanaan kegiatan yang keluar dari koridor rencana aksi yang telah ditetapkan khususnya terkait waktu pelaksanaan;
2. Pemenuhan dan pengumpulan data dukung capaian kinerja yang terkadang tidak sesuai antara laporan yang ada dan data dukung yang disediakan oleh Bidang teknis.

UPAYA PENINGKATAN KINERJA

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran 1 yaitu:

1. Melakukan evaluasi rutin terkait capaian kinerja untuk menentukan strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja;
2. Konsisten dalam pelaksanaan rencana aksi yang telah ditentukan.

SASARAN 2

MENINGKATNYA AKSES DAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI DAN ASPIRASI PUBLIK

Sasaran 2 (dua) dengan indikator Persentase Layanan Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dengan realisasi kinerja 100% dari target kinerja 100% dalam kategori Berhasil dengan capaian **100,00%**.

FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN

Beberapa hal yang mendukung keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran 2 sebagai berikut:

1. Komitmen Pimpinan dalam peningkatan kualitas pelayanan informasi dan komunikasi;
2. Publikasi yang intens dan up to date melalui website <https://bone.go.id/> atau <https://kominform.bone.go.id/>, konten humas bone melalui media facebook, Instagram, maupun twitter, PPID, KIM serta radio SBB maupun kerjasama dengan media dalam rangka penyebarluasan informasi pembangunan dan pemerintahan sehingga informasi dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat;
3. Adanya Peraturan Bupati Bone Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Publikasi Pemerintah Daerah melalui Media Massa, maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone melakukan seleksi ketat dalam melakukan terhadap media maupun mitra strategis pemerintah daerah dalam menyebarkan informasi sehingga informasi yang dihasilkan up to date, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dokumen Digital | PERBUP 23 | 2021



Dokumentasi Penilaian Keterbukaan Informasi 2022

FAKTOR PENGHAMBAT

Pencapaian diatas telah mencapai target, namun masih terdapat hambatan dalam pencapaiannya, yaitu:

1. Tingginya intensitas maintenance aplikasi pendukung penyebarluasan informasi;
2. Keterbatasan anggaran berdampak pada intensitas dan kualitas program yang kurang efektif;
3. Sarana dan prasarana kurang memadai sehingga beberapa media informasi yang dikelola tidak efektif menjangkau seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bone.

UPAYA PENINGKATAN KINERJA

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran 2 yaitu:

1. Memaksimalkan pemanfaatan LPPL Radio SBB dalam penyebarluasan informasi;
2. Melibatkan unsur-unsur pemerintahan dari berbagai sektor sehingga informasi yang disampaikan lebih komprehensif;
3. Memanfaatkan website dan konten secara maksimal.



Dokumentasi Interkoneksi Jaringan 2022

SASARAN 3

MENINGKATNYA AKSES DAN KUALITAS LAYANAN E-GOVERNMENT

Sasaran 3 (tiga) dengan indikator Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang Terhubung dengan Akses Internet yang disediakan Oleh Dinas Kominfo dengan realisasi kinerja 84,62 dari target kinerja 75% dalam kategori Sangat Berhasil dengan capaian **112,82%**.

FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN

Beberapa hal yang mendukung keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran 3 sebagai berikut:

1. Jumlah perangkat daerah yang terkoneksi dengan jaringan internet sebanyak 55 terdiri dari 38 Dinas dan Badan, 2 BLUD ditambah 15 Kecamatan;
2. Penyediaan domain dan sub domain di seluruh Organisasi Perangkat Daerah.



Dokumen Digital | INTERKONEKSI JARINGAN | 2022

FAKTOR PENGHAMBAT

Pencapaian diatas telah mencapai target, namun masih terdapat hambatan dalam pencapaiannya, yaitu:

1. Stabilitas dan koneksi jaringan terkadang lemot/buruk;
2. Keterbatasan anggaran pemeliharaan pengelolaan IT termasuk pemeliharaan jaringan FO dan maintenance website;
3. Rendahnya kapasitas server yang tidak mampu menampung seluruh sub domain dan aplikasi yang ada sehingga belum dapat dilakukan pengintegrasian terhadap seluruh aplikasi yang ada pada Pemerintah Kabupaten Bone

UPAYA PENINGKATAN KINERJA

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran 3 yaitu:

1. Supporting bandwidth dengan kecepatan 350-400 Mbps untuk memaksimalkan stabilitas dan konektivitas jaringan ke OPD yang telah terkoneksi dengan jaringan Diskominfo;
2. Peningkatan keamanan server secara terenkripsi;
3. Penyediaan fasilitas wifi publik pada acara-acara yang melibatkan masyarakat luas.

SASARAN 4

MENINGKATNYA KETERSEDIAAN DATA STATISTIK SEKTORAL

Sasaran 4 (empat) dengan indikator Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah dengan realisasi kinerja 100 dari target kinerja 100 dalam kategori Berhasil dengan capaian **100,00%**.

FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN

Beberapa hal yang mendukung keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran 4 sebagai berikut:

1. Koordinasi yang intensif dan efektif dengan seluruh organisasi perangkat daerah, kelurahan, dan desa terkait tanggung jawab sebagai produsen data sektor untuk melaporkan perkembangan data statistik secara berkala dan berkelanjutan;
2. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah telah menyusun perencanaan berbasis data;
3. Pengembangan aplikasi SIPBM berbasis android.

FAKTOR PENGHAMBAT

Pencapaian diatas telah mencapai target, namun masih terdapat hambatan dalam pencapaiannya, yaitu:

1. Adanya perubahan atau pergantian pejabat struktural pada organisasi perangkat daerah yang berpengaruh pada proses pengelolaan data sektor pada OPD yang bersangkutan;
2. Sistem Bone Satu Data belum berjalan sepenuhnya.



Dokumentasi Rapat Koordinasi Pengumpulan Data Statistik 2022

UPAYA PENINGKATAN KINERJA

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran 4 yaitu:

1. Optimalisasi fungsi grup pengelola data sektor Kabupaten Bone dalam melakukan komunikasi terkait pengelolaan data statistik sektoral;
2. Intensif melakukan komunikasi dan Kerjasama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone sebagai pembina statistik di daerah guna mengoptimalkan proses pengumpulan dan pemanfaatan data statistik sektoral di Kabupaten Bone;
3. Membentuk Forum Data Kabupaten Bone melalui Peraturan Bupati Bone Nomor 30 Tahun 2021 tentang Sistem Satu Data untuk Pembangunan Daerah Kabupaten Bone.

Dokumen Digital | PERBUP 23 | 2021





Dokumentasi Koordinasi Perubahan Nama Admin JKS 2022

SASARAN 5

MENINGKATNYA KEAMANAN INFORMASI

Sasaran 5 (lima) dengan indikator Indeks Keamanan Informasi (KAMI) dengan realisasi kinerja 585 dari target 584 dalam kategori Berhasil dengan capaian **100,17%**.

FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN

Beberapa hal yang mendukung keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran 5 sebagai berikut:

1. Adanya koordinasi yang baik antara penyalurandan pengamanan akses informasi berita melalui Jaringan Komunikasi Sandi (JKS) dan pengelolaan informasi daerah melalui PPID;
2. Tersedianya perangkat dan jaringan teknologi informatika pada Organisasi Perangkat Daerah.

FAKTOR PENGHAMBAT

Pencapaian diatas telah mencapai target, namun masih terdapat hambatan dalam pencapaiannya, yaitu:

1. Belum optimalnya perangkat pengaman teknologi informatika dan pemahaman tentang system keamanan informasi;
2. Terbatasnya SDM yang mumpuni dalam mengelola system keamanan informasi dan perangkat teknologi informatika.



Dokumen Digital | INDEKS KAMI | 2021

UPAYA PENINGKATAN KINERJA

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran 5 yaitu:

1. Peningkatan kualitas jaringan selaras dengan kualitas keamanan perangkat teknologi informatika;
2. Membentuk grup pengelola persandian pada Organisasi Perangkat Daerah untuk menjamin tersampainya berita secara tepat waktu.

6. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki dalam mencapai tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi. Sumber daya tersebut berupa sumber daya manusia, sarana prasarana, dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 untuk melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E	: Efisiensi
PAKi	: Pagu anggaran keluaran i
RAKi	: Realisasi anggaran keluaran i
CKi	: Capaian keluaran i

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses pencapaian tujuan/sasaran yang telah ditargetkan dalam jangka waktu tertentu. Semakin hemat/minim penggunaan sumber daya, maka proses pencapaian target semakin efisien. Berikut ini tabel analisis efisiensi sumber daya Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2022.

Tabel 3.7
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Formulasi perhitungan dan Efisiensi (%)
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP	BB	*A	120,00	5.164.344.359	5.017.216.227	97,15	$\left\{ \frac{((5.164.344.359 \times 120,00) / 100 - 5.017.216.227)}{(5.164.344.359 \times 120,00) / 100} \right\} \times 100$ =19,04
Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Informasi dan Aspirasi Publik	Persentase Layanan Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	100	100	100,00	625.940.740	599.311.954	95,75	$\left\{ \frac{((625.940.740 \times 100,00) / 100 - 599.311.954)}{(625.940.740 \times 100,00) / 100} \right\} \times 100$ =4,25
Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan E-Government	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang Terhubung dengan Akses Internet yang disediakan Oleh Dinas Kominfo	75	84,62	112,83	1.692.128.000	1.691.733.500	99,98	$\left\{ \frac{((1.692.128.000 \times 112,83) / 100 - 1.691.733.500)}{(1.692.128.000 \times 112,83) / 100} \right\} \times 100$ =11,39
Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik sektoral	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	100	100	100,00	81.045.050	77.587.850	95,73	$\left\{ \frac{((81.045.050 \times 100,00) / 100 - 77.587.850)}{(81.045.050 \times 100,00) / 100} \right\} \times 100$ =4,27
Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	584	585	100,17	45.785.550	41.657.050	90,98	$\left\{ \frac{((45.785.550 \times 100,17) / 100 - 41.657.050)}{(45.785.550 \times 100,00)} \right\} \times 100$ =9,17
Total/Rata-Rata				106,60	7.609.243.699	7.427.506.581	97,61	37,38

Sumber Data: Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dengan perbandingan antara capaian kinerja dengan capaian realisasi anggaran, maka dapat dilihat bahwa terdapat efisiensi anggaran dan efektivitas penggunaan dana berdasarkan kinerja yaitu:

- 1.Indikator Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP dengan capaian kinerja 120,00% dan capaian anggaran 97,15%, menunjukkan bahwa efisiensi anggaran sebesar 2,85% dan efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 19,04%.
- 2.Indikator Persentase Layanan Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dengan capaian kinerja 100,00% dan capaian anggaran 95,75% menunjukkan efisiensi anggaran sebesar 4,25% dan efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 4,25%.
- 3.Indikator Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang Terhubung dengan Akses Internet yang disediakan Oleh Dinas Kominfo dengan capaian kinerja 112,83% dan capaian anggaran 99,98% menunjukkan efisiensi anggaran sebesar 0,02% dan efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 11,39%.
- 4.Indikator Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah dengan capaian kinerja 100,00% dan capaian anggaran 95,73% menunjukkan efisiensi anggaran sebesar 4,27% dan efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 4,27%.
- 5.Indikator Indeks Keamanan Informasi (KAMI) dengan capaian kinerja 100,17% dan capaian anggaran 90,98% menunjukkan efisiensi anggaran sebesar 9,02% dan efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 9,17%.

7. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Analisis terhadap program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone sebagai berikut:

Tabel 3.8
Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

NO	TUJUAN	SASARAN/PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME/OUTPUT	SATUAN KINERJA	TARGET	ANGGARAN	REALISASI		PERSENTASE REALISASI		EFISIENSI	PERMASALAHAN	SOLUSI	TINDAK LANJUT
							KINERJA	KEUANGAN	KINERJA	KEUANGAN				
1	Meningkatkan Implementasi Teknologi Informasi dalam Menjaga Keamanan Data Komunikasi dan Penyebarluasan	Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Persandian	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	Predikat	BB	5,164,344,359.00	A	5,017,216,227.00	120.00	97.15	19.36	Kurangnya kapasitas SDM	Upaya Peningkatan Kapasitas SDM dan motivasi untuk meningkatkan kinerja	Memberikan reward kepada penanggung jawab kegiatan sesuai indikator pemberian reward yang telah ditetapkan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	%	100%	5,164,344,359.00	120.47%	5,017,216,227.00	120.47	97.15	19.36	Jumlah kapasitas SDM Aparatur yang terbatas	Perlu ada dukungan penuh dari unsur pimpinan pada setiap pelaksanaan program	Melakukan upaya peningkatan kapasitas SDM Aparatur
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah Yang tersusun selama 1 Tahun	Dokumen	6	75,154,000.00	11	63,393,430.00	183.33	84.35	53.99	Masih ada beberapa data yang memiliki format baku sehingga menghambat proses pemenuhannya	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang berkualitas	Keseragaman format baku evaluasi untuk seluruh OPD oleh APIP
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan yang tersusun	Dokumen	3	6,350,000.00	8	6,350,000.00	266.67	100.00	62.50	Terbatasnya waktu pada setiap tahapan perencanaan dan penganggaran	Jadwal perencanaan dan penganggaran yang jelas dalam aplikasi	Manajemen waktu yang baik sesuai dengan rencana aksi
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi & Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan yang tersusun	Dokumen	3	68,804,000.00	3	57,043,430.00	100.00	82.91	0.00	Masih ada beberapa data dukung yang memiliki format baku sehingga menghambat proses pemenuhannya	Pemenuhan data dukung dan laporan yang intens dari seluruh Bidang dan Sekretariat Dina setiap triwulannya	Keseragaman format baku penilaian untuk seluruh OPD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Baik	%	100%	3,391,379,899.00	100%	3,338,711,449.00	100.00	98.45	0.00	Keterlambatan pemindahbukuan pada aplikasi pelaporan keuangan	Melengkapi bahan penyusunan laporan	Melakukan cek manual terhadap pemindahbukuan laporan

		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan, yang dijamin pemeliharaan kesehatannya setiap bulan	Orang	33	3,375,966,199.00	33	3,323,401,749.00	100.00	98.44	0.00	Terlambatnya penerimaan gaji pada awal tahun dan keterlambatan pencairan TPP	Pembuatan ampra gaji dan tunjangan ASN yang tepat waktu	Pembuatan dan pengajuan SPM gaji tepat waktu ke BKAD dan Pemenuhan data dukung pencairan TPP dan pengajuan verifikasi ke BKPSDM tepat waktu
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang tersusun	Laporan	19	15,413,700.00	19	15,309,700.00	100.00	99.33	0.00	Aplikasi kadang lemot karena terlalu banyak OPD yang mengaksesnya dalam waktu yang bersamaan	Pertanggungjawaban dan laporan alokasi anggaran yang rutin dari bendahara	Perlu peningkatan kapasitas dan kecepatan aplikasi pelaporan keuangan
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang mengikuti Program peningkatan Kapasitas Pendukung	%	100%	5,000,000.00	100.00%	4,750,000.00	100.00	95.00	0.00	Masih banyak jabatan dalam dokumen evjab yang tidak terisi	Kemampuan manajerial pegawai dalam penyelesaian tupoksi	Mengajukan usulan kebutuhan ke BKPSDM dalam setiap pengadaan ASN baru
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Bimtek (orang)	Orang	1	5,000,000.00	1	4,750,000.00	100.00	95.00	0.00	Tidak adanya undangan atau surat permintaan peserta Bimtek	Aparat yang siap mengikuti Bimtek	Memperbanyak pelaksanaan dan keikutsertaan aparat dalam Bimtek berbasis online
			Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	Orang	2		2		100.00		0.00			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi perkantoran	%	100%	671,611,499.00	158.26%	646,863,331.00	158.26	96.32	39.14	Besaran anggaran tidak sejalan dengan besarnya kebutuhan Dinas	Alokasi anggaran pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	Sistem satu pintu dalam pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik yang di beli	Jenis	5	1,660,000.00	5	1,660,000.00	100.00	100.00	0.00	Tidak adanya tenaga yang mumpuni untuk mengecek dan melakukan penggantian apabila terjadi kerusakan	Alokasi anggaran untuk penggantian alat-alat listrik yang mengalami kerusakan	Perlu adanya tenaga atau aparat khusus untuk menangani masalah kelistrikan

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di beli	Jenis	32	109,239,249.00	32	109,229,249.00	100.00	99.99	0.00	Tidak adanya daftar permintaan kebutuhan oleh Bidang dan Sekretaris Dinas sehingga pemenuhan kebutuhan peralatan dengan sistem satu pintu kadang terhambat	Alokasi anggaran sesuai kebutuhan	Pembuatan daftar permintaan kebutuhan peralatan oleh Bidang dan Sekretariat Dinas
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik kantor yang di beli	Jenis	14	268,900,000.00	14	268,900,000.00	100.00	100.00	0.00	Kurangnya item bahan logistik yang tersedia dalam menu penganggaran	Pengusulan item belanja melalui aplikasi Ssidirga SIPD	Penambahan usulan item belanja bahan logistik pada SSH aplikasi Ssidirga
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang yang di cetak dan di gandakan	Jenis	4	50,708,250.00	4	50,708,250.00	100.00	100.00	0.00	Ada beberapa item barang cetakan yang tidak tersedia di aplikasi	Alokasi anggaran yang memadai	Penambahan item barang
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Konsultasi dalam daerah dan Luar Daerah yang di ikuti	Kali	60	241,104,000.00	127	216,365,832.00	211.67	89.74	57.60	Terdapat banyak kelebihan di akhir tahun anggaran karena banyaknya item anggaran yang tidak dapat digunakan	Perlu perhitungan yang lebih tepat dan teliti terhadap seluruh item belanja perjalanan dinas	Memasukkan item belanja yang rawan menimbulkan silpa seperti item penginapan 30%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	%	100%	502,243,330.00	100%	447,200,835.00	100.00	89.04	0.00	Jumlah unit yang kurang tidak dibarengi dengan alokasi anggaran yang memadai	Mengajukan penambahan alokasi anggaran	Membuat telaahan staf pemenuhan barang
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor sesuai rencana kebutuhan	Unit	14	502,243,330.00	14	447,200,835.00	100.00	89.04	0.00	Masih kurangnya jumlah peralatan dan mesin berkaitan dengan usia dinas yang memang masih baru	Pengadaan barang secara bertahap	Pengadaan peralatan sesuai dengan daftar kebutuhan peralatan sekretariat dinas dan bidang dengan tetap memperhatikan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100%	255,518,400.00	100%	255,281,832.00	100.00	99.91	0.00	Upah kerja yang tidak memadai	Pengusulan kenaikan upah sesuai beban kerja	Membuat usulan kenaikan upah untuk dimasukkan dalam penyusunan SBU

		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum yang di bayarkan perbulan	Orang	432	255,518,400.00	432	255,281,832.00	100.00	99.91	0.00	Besaran upah kerja yang tidak sebanding dengan beban kerja	Adanya penambahan besaran upah bagi tenaga lapangan seperti petugas sound system dan petugas perbaikan jaringan	Membuat telaahan staf penambahan upah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	%	100%	263,437,231.00	142.62%	261,015,350.00	142.62	99.08	30.53	Jumlah sarana dan prasarana yang terbatas	Melakukan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana yang mengalami	Perbaikan dilakukan sebelum terjadi kerusakan yang lebih parah
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	3	39,089,450.00	3	36,885,350.00	100.00	94.36	0.00	Jumlah kendaraan dinas yang terbatas	Penambahan unit kendaraan dinas khususnya untuk pelayanan sound system dan mobi pelayanan informasi keliling	Membuat telaahan staf untuk penambahan dinas operasional
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang di Pelihara	Jenis	4	25,130,000.00	4	25,130,000.00	100.00	100.00	0.00	Jumlah peralatan kantor yang terbatas	Pemanfaatan peralatan yang efektif dan efisien	Pemeliharaan berkala untuk mencegah kerusakan
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah dan luas gedung yang direhab	m ²	418	199,217,781.00	418	199,000,000.00	100.00	99.89	0.00	Total alokasi anggaran yang terbatas sehingga perbaikan hanya dilakukan pada atap bagian depan sementara atap bagian belakang hanya perbaikan existing	Perbaikan atap sebesar 60% sesuai kemampuan anggaran	Pengalokasian anggaran untuk mencover perbaikan atas kerusakan gedung kantor yang belum terselesaikan terutama bagian atap bagian belakang dan plafon pada tahun berikutnya
		Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Informasi dan Aspirasi Publik	Persentase Layanan Publik Dinas Komunikasi dan Informatika	%	100	625,940,740.00	100	599,311,954.00	100.00	95.75	0.00	Terkadang terdapat pemberitaan negatif terhadap pemerintah Kabupaten	Meningkatkan Peran aktif penanggung jawab informasi dalam menepis berita hoaks	Memberikan klarifikasi dan penyampaian kepada stake holder terkait untuk melaukan klarifikasi terhadap pemberitaan-pemberitaan negatif

		Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten	%	85%	625,940,740.00	104.88%	599,311,954.00	123.39	95.75	22.40	Sarana dan prasarana kurang memadai sehingga beberapa media informasi yang dikelola tidak efektif menjangkau seluruh lapisan masyarakat kabupaten bone	Memperkuat kerjasama tim internal dan koordinasi lintas bidang dalam upaya memaksimalkan kualitas layanan informasi	Melibatkan unsur-unsur pemerintahan dari berbagai sektor sehingga informasi yang disampaikan lebih komprehensif
		Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten	%	85%	625,940,740.00	89.15%	599,311,954.00	104.88	95.75	0.00	Banyaknya berita hoaks yang tersebar melalui media sosial	Melakukan klarifikasi terhadap seluruh berita hoaks yang beredar	Identifikasi dan antisipasi berita sebelum tersebar ke masyarakat
		Monitoring Opini dan Dan Aspirasi Publik	Jumlah Aduan/Aspirasi/Apresiasi Publik yang ditindak lanjut	Aduan	33	16,964,500.00	68	16,612,100.00	206.06	97.92	52.48	Pimpinan instansi dan pejabat tinggi lainnya belum sepenuhnya mendukung dan memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas sistem pengelolaan pengaduan Laporan SP4N bisa menjadi Satu Pintu Pengaduan Di Kab Bone	Melakukan Kontrol/Pengawasan terhadap tindak lanjut Penyelesaian aduan Masyarakat terhap Instansi terkait	Sosialisasi LAPOR Kepada Masyarakat Melalui Media Elektronik (Talkshow Radio SBB, Poster Pengaduan, Spanduk dan Baliho, Mobil Kelling) dan Semua pembuat kebijakan, termasuk pimpinan tertinggi Instansi, secara Aktif terlibat dalam keseluruhan Proses Kebijakan, mulai dari formulasi, Koordinasi Implementasi hingga Pemantauan dan Evaluasi dan Laporan SP4N bisa menjadi Satu Pintu Pengaduan di Kab Bone
			Jumlah Pengaduan yang di terima	Aduan	33		68		206.06					
		Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Kecamatan yang terdata Medianya	Kecamatan	6	10,020,000.00	6	9,629,000.00	100.00	96.10	0.00	Minimnya pengetahuan dan pengelolah media untuk mengupdate dan menginformasikan berbagai hal penting terkait media yang dikelolahnta terhadap	Koordinasi yang intensif dengan organisasi/ koorporasi pengusaha pengelolah media	Mengefektifkan sosialisasi bersama dengan KPID terkait regulasi, hak dan kewajiban pengelolaan TV Kabel

		Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah publikasi Konten Informasi yang disebarluaskan melalui Media Luar Ruang, Media Sosial dan Media Center Publik	Publikasi	150	134,694,000.00	157	132,797,200.00	104.67	98.59	0.00	Masih terdapat beberapa OPD yang tidak memberikan data/dokumen yang akan dipublikasikan	Kerjasama yang baik dengan seluruh OPD maupun pihak lain yang berkepentingan	Menghubungi /mendatangi OPD terkait untuk meminta data untuk dibuatkan konten dan disebarluaskan kepada masyarakat
			Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi	Konten	110		121		110.00					
			Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	Layanan	15		17		113.33					
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Program Siaran yang Terlaksana	Program	4	29,979,640.00	16	29,792,640.00	400.00	99.38	75.16	Kurang disiplinnya SDM pengelola media komunikasi Publik dalam mematuhi agenda dan jadwal pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan pelaksanaan kegiatan	Membentuk group komunikasi dan koordinasi melalui Aplikasi Chat WA untuk mengantisipasi jadwal siaran yang kosong atau adanya pergantian jadwal siaran	Pelaksanaan rapat evaluasi rutin perbulan untuk meminimalkan kendala-kendala teknis pelaksanaan kegiatan
		Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Informasi dan Dokumentasi yang tersedia pada PPID Kabupaten Bone	Dokumen	520	11,499,800.00	401	10,424,414.00	77.12	90.65	0.00	Terdapat 1 indikator kinerja yang tidak mencapai target disebabkan adanya maintenance pada 2 (dua) bulan terakhir tahun berjalan yang menyebabkan penguploadan data tidak dapat dilakukan	Mengantisipasi adanya maintenance di akhir tahun dengan cara melakukan upload data semaksimal mungkin	Mengupload dokumen informasi secara berkala sesuai dengan masa terbit informasi
			Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	Layanan	23		23		100.00					
			Jumlah data yang dapat berbagi pakai	Data	9		9		100.00					
			Jumlah layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	Layanan	8		8		100.00					
			Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	dokumen	1		1		100.00					
		Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Pelayanan Sound Sistem dan Mobil Informasi yang terlaksana	Kegiatan	36	24,054,000.00	53	23,681,200.00	147.22	98.45	33.13	Jumlah SDM pengelola Sarana media komunikasi Publik yang Minim Kuantitasnya Hanya terdiri 4 petugas lapangan	Adanya komitmen yang positif dari pelaksana teknis kegiatan untuk bekerja maksimal melebihi jam dan waktu kerja regulier	Dibutuhkan penambahan tenaga pelaksana teknis lapangan dan administrator pelaksana kegiatan

	Penguatan Kapasitas sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Kelompok Informasi yang dibina	Kelompok	20	14,199,800.00	20	14,039,800.00	100.00	98.87	0.00	Kelompok informasi yang rendah jaringan terkadang kurang mengupdate perkembangan informasi	Perlu adanya tim kerja yang solid	Melakukan kerja dan usaha extra oleh KIM yang minim jaringan untuk mencari perkembangan informasi yang up to date
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Media dan Layanan Penyedia Informasi yang dikerjasamakan	Media	30	384,529,000.00	32	362,335,600.00	106.67	94.23	0.00	Terdapat beberapa berita yang terbit tidak sesuai dengan Kontrak kerja sama media yang telah disepakati	Menerbitkan berita-berita pembangu nan dan kinerja Pemerintah Kab Bone, baik di media cetak maupun di media online	Lebih menekankan batasan penerbitan berita dalam item kontrak kerjasama media
		Jumlah komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	Media	30		32		106.67			Tidak tersedia anggaran untuk peningkatan SDM bagi Komunitas masyarakat	Peningkatan peran serta Komunitas masyarakat dalam penyebarnya san informasi	Mengajukan permohonan anggaran peningkatan SDM
	Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan E-Government	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	75	1,692,128,000.00	84.62	1,691,733,500.00	112.83	99.98	0.00	Kurangnya aparat yang berkompeten dalam pengelolaan aplikasi	Peningkatan kapasitas SDM pengelola aplikasi	Memberi arahan terkait pengelolaan aplikasi dan web terhadap SDM Bidan TI
	Program Aplikasi Informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	75%	1,692,128,000.00	84.62%	1,691,733,500.00	112.83	99.98	11.39	Tingkat keamanan jaringan masih rendah	Meningkatkan keamanan jaringan pemerintah	Peningkatan keamanan server secara terenkripsi
	Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Persentase Pengelolaan E-Government di Lingkup Daerah Kab.Kota	%	100%	1,692,128,000.00	119.93%	1,691,733,500.00	119.93	99.98	16.64	Dukungan kapasitas server yang memadai	Penambahan kapasitas server	Membuat telaahan staf untuk alokasi anggaran peningkatan kapasitas server
	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah titik pengadaan Kapasitas Bandwidth 275 s.d 400 Mbps di kabupaten kota	Titik	9	1,643,000,000.00	9	1,642,965,500.00	100.00	100.00	0.00	Konektivitas jaringan yang kadang lemot	Peningkatan kapasitas bandwidth	Penyediaan pusat layanan khusus untuk menangani masalah jaringan di setiap hari kerja
		Jumlah perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	OPD	48		55		114.58					
		Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	OPD	48		55		114.58					
		Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	OPD	65	-	65		100.00					
		Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan Pusat data Pemerintah	OPD	65	-	65		100.00					
		Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	OPD	65	-	65		100.00					

	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pelaksanaan dan Pengawasan E-government (Jaringan Internet, Website, Aplikasi yang dibangun dan Penggunaan Aplikasi)	Paket	1	13,566,000.00	1	13,390,000.00	100.00	98.70	0.00	Pembangunan Aplikasi belum menggunakan platform API yang sama	Penggunaan platform API dalam pembangunan server	Penyediaan layanan webservice kepada penyedia aplikasi
		Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	OPD	7		10		142.86					
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan	Jumlah Aplikasi terintegrasi	Aplikasi	1	21,074,000.00	1	20,988,000.00	100.00	99.59	0.00	Masih kurangnya SDM pengelola webservice aplikasi di OPD	Menyediakan portal sebagai wadah aplikasi di OPD	Maintenance berkala terhadap portal OPD
		Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	OPD	39		39		100.00					
		Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	Aplikasi	25		25		100.00					
		Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	Layanan	4		4		100.00					
		Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Sistem	5		5		100.00					
	Pengembangan dan Pengelolaan sumber Daya Teknologi Informasi dan komunikasi Pemerintah	Jumlah Bimbingan Teknis berbasis Teknologi Informasi yang terlaksana (Bimtek Website, Vidcom)	Kali	1	14,488,000.00	1	14,390,000.00	100.00	99.32	0.00	Peserta Pelatihan masih banyak yang belum melek IT	Menghadirkan instruktur yang memiliki kompetensi dibidang IT	Peserta BIMTEK harus memiliki standar kompetensi yang memadai dalam mengikuti BIMTEK
		Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara	Event	410		564		137.56					
		Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	OPD	65		65		100.00					
	Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100%	81,045,050.00	100.00%	77,587,850.00	100.00	95.73	0.00	Beberapa data terkait komunikasi informatika sulit untuk dikumpulkan	Diperlukan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan seluruh aparat terkait pengumpulan data sektoral	Memberi arahan kepada aparat pengelola data sektoral untuk mengumpulkan dan memperbaharui data terkait komunikasi informatika secara berkala

		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100%	81,045,050.00	100.00%	77,587,850.00	100.00	95.73	0.00	Masih terbatasnya SDM pengelola data di setiap organisasi perangkat daerah sehingga belum menyediakan data valid dan akurat secara optimal	Koordinasi yang intensif dan efektif dengan seluruh organisasi perangkat daerah, kelurahan, dan desa terkait tanggung jawab sebagai produsen data sektor untuk melaporkan perkembangan data statistik secara berkala dan berkelanjutan	Membentuk grup pengelola data sektor yang terdiri dari pejabat atau staf dari seluruh organisasi perangkat daerah sehingga mempermudah dalam melakukan komunikasi terkait pengelolaan data statistik sektoral
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral dilingkup Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100%	81,045,050.00	100.00%	77,587,850.00	100.00	95.73	0.00	Adanya perubahan atau pergantian pejabat struktural pada organisasi perangkat daerah yang berpengaruh pada proses pengelolaan data sektor pada OPD yang bersangkutan	Seluruh organisasi perangkat daerah harus menyusun perencanaan berbasis data	Melakukan komunikasi dan Kerjasama yang intensif dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone sebagai pembina statistik di daerah guna mengoptimalkan proses pengumpulan dan pemanfaatan data statistik sektoral di Kabupaten Bone
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis, dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumen yang disusun	Dokumen	3	59,198,000.00	3	56,173,800.00	100.00	94.89	0.00	Masih kurangnya perhatian dan rendahnya pengetahuan aparat desa dan kelurahan akan pentingnya data statistik yang diminta untuk mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Melakukan jemput bola pengumpulan data statistik sektoral	Melakukan dan memberikan pelatihan kepada 372 desa dan kelurahan tentang pentingnya peran data statistik sektoral dalam pembangunan
			Tersedianya Buku Profil Daerah (Dokumen)	Dokumen	2		2		100.00					
			Jumlah Survey statistik sektoral yang dilakukan (Kegiatan)	Kegiatan	1		1		100.00					
			Jumlah Kompilasi Statistik sektoral yang dilakukan (Dokumen)	Dokumen	1		1		100.00					
			Jumlah Survey statistik sektoral yang mendapatkan rekomendasi BPS (Kegiatan)	Kegiatan	1		1							
			Jumlah Kompilasi statistik sektoral yang mendapatkan rekomendasi BPS (Kegiatan)	Kegiatan	1		1		100.00					

		Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah peningkatan kapasitas Aparatur yang dapat menyusun, mengolah data statistik sektoral yang valid dan akurat (orang)	Orang	1	7,667,500.00	1	7,234,500.00	100.00	94.35	0.00	Kurangnya pengelola statistik aparat data	Melakukan upaya peningkatan kapasitas aparatur yang ada	Melanjutkan pengalokasian dana untuk peningkatan kapasitas aparatur di tahun berikutnya
		Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Penelitian dan Pengumpulan Data statistik sektoral yang dilaksanakan	Dokumen	1	14,179,550.00	1	14,179,550.00	100.00	100.00	0	Sulitnya memperoleh sumber data yang valid untuk beberapa jenis data yang dibutuhkan	Adanya data pengganti yang mendekati data variabel yang bersifat spesifik	Mengoptimalkan pemenuhan data statistik sektoral melalui sistem satu data
			Jumlah Kelengkapan Metadata Kegiatan Statistik sektoral (Kegiatan)	Kegiatan	3		3		100.00					
			Jumlah Kelengkapan Metadata Variabel dektoral (Variabel)	Variabel	60		60		100.00					
		Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Skor	584%	45,785,550.00	585	41,657,050.00	100.17	90.98	0.00	Jumlah dan kapasitas SDM yang memadai	Penambahan aparat sandiman yang berkompeten	Memberi arahan kepada aparat sandi untuk melakukan upaya penuh dalam pengelolaan persandian dengan segala keterbatasan sarana dan prasarana
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	%	100%	45,785,550.00	122.69%	41,657,050.00	122.69	90.98	25.84	Belum optimalnya perangkat pengaman teknologi informatika dan pemahaman tentang system keamanan informasi	Melakukan koordinasi yang baik antara penyaluran dan pengamanan akses informasi berita melalui Jaringan Komunikasi Sandi (JKS) dan pengelolaan informasi daerah melalui PPID	Peningkatan kualitas jaringan selaras dengan kualitas keamanan perangkat teknologi informatika
		Penyelenggaraan Persandian untuk keamanan Informasi Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Keamanan Informasi dan Jaringan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	100%	23,019,550.00	105.38%	21,173,050.00	105.38	91.98	0.00	Terbatasnya SDM yang mumpuni dalam mengelola system keamanan informasi dan perangkat teknologi informatika	Penyediaan perangkat dan jaringan teknologi informatika pada Organisasi Perangkat Daerah	Membentuk grup persandian pada Organisasi Perangkat Daerah untuk menjamin tersampainya berita secara tepat waktu

		Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Analisis dan Asesmen Perangkat Teknologi Informasi Persandian	Dokumen	4	11,692,550.00	4	10,674,250.00	100.00	91.29	0.00	Kurangnya penganggaran dalam pelaksanaan kegiatan	Mengalokasikan anggaran sesuai kebutuhan pelaksanaan kegiatan	Membuat telaahan staf penambahan alokasi anggaran
			Jumlah Sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem Manajemen yang telah menerapkan Prinsip-prinsip manajemen keamanan Informasi (SMKI) dan atau Aplikasi Persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah Daerah	Website	39		39		100.00					
		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berbasis elektronik dan Non elektronik	Jumlah Berita/Informasi dan dan jaringan yang diakses dan diamankan dan distribusikan tepat waktu	Berita	1000	11,327,000.00	1071	10,498,800.00	107.10	92.69	0.00	Keterhubungan OPD dan perangkat daerah lainnya pada JKS Kominfo Bone belum menyeluruh	Mengupayakan keterhubungan OPD pada JKS Kominfo Bone	Peningkatan Keterhubungan OPD dan perangkat daerah lainnya pada JKS Kominfo Bone melalui grup komunikasi sandi
			Jumlah kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	Kegiatan	52		52		100.00					
			Jumlah titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	Titik	57		57		100.00					
		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Kabupaten/Kota	Persentase penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah	%	100%	22,766,000.00	140.00%	20,484,000.00	140.00	89.98	35.73	Minimnya perangkat persandian	Pola Hubungan Komunikasi antar OPD	Telaahan staf untuk mencover rencana Pengadaan perangkat
		Operasionalisasi jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita yang diterima melalui JKS	Berita	1000	22,766,000.00	1400	20,484,000.00	140.00	89.98	35.73	Masih terbatasnya perangkat yang tersedia	Penambahan perangkat pada pengalokasian anggaran	Membuat telaahan staf untuk pengadaan perangkat persandian
JUMLAH						7,609,243,699		7,427,506,581		97.61				

ULASAN TABEL ANALISIS

Berdasarkan tabel tentang Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja, dapat dijelaskan hal sebagai berikut:

SASARAN 1

Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

INDIKATOR: PREDIKAT EVALUASI SAKIP OLEH APIP

Dengan target BB telah Berhasil mencapai nilai A atau tercapai **120,00%**. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hasil evaluasi program/kegiatan pada sasaran 1 (satu) yang dilaksanakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone pada tahun 2022 melalui analisa capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas, ada upaya-upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk pencapaian kinerja tahun berikutnya, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas dan sinergitas antara perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.
2. Melengkapi administrasi dan dokumentasi seluruh pelaksanaan program/kegiatan serta bukti pendukung realisasi output maupun outcome yang dicapai.

SASARAN 2

Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Informasi dan Aspirasi Publik

INDIKATOR: PERSENTASE LAYANAN PUBLIK DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Dengan target kinerja 100% telah Berhasil mencapai realisasi kinerja 100% atau tercapai **100,00%**. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program Informasi dan Komunikasi Publik.

Berdasarkan hasil evaluasi program/kegiatan pada sasaran 2 (dua) tersebut di atas, ada upaya-upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk pencapaian kinerja tahun berikutnya, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas dan daya tarik diseminasi informasi layanan publik.
2. Menambah rubrik pemberitaan pada website, konten ataupun program pada LPPL Suara Bone Beradat terkait kiat-kiat sukses dan keseharian pejabat-pejabat pemerintah Kabupaten Bone.
3. Melakukan proses pengumuman dan penerimaan penawaran Kerjasama dari media/mitra strategis pada akhir tahun n-1 agar media dapat mempersiapkan segala dokumen dan kelengkapan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

SASARAN 3

Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan E-government

INDIKATOR: PERSENTASE ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) YANG TERHUBUNG DENGAN AKSES INTERNET YANG DISEDIAKAN OLEH DINAS KOMINFO

Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan Akses Internet yang disediakan Oleh Dinas Kominfo dengan target kinerja 75% telah Berhasil mencapai realisasi kinerja 84,62 atau tercapai **112,83%**. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program Aplikasi Informatika.

Berdasarkan hasil evaluasi program/kegiatan pada sasaran 3 (tiga) tersebut di atas, ada upaya-upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk pencapaian kinerja tahun berikutnya, yaitu:

1. Melakukan peremajaan pada jaringan kabel Fiber Optik.
2. Menambah titik pengadaan bandwidth pada 6 (Enam) Kecamatan.
3. Menambah titik penyediaan wifi publik pada kawasan-kawasan strategis yang banyak dikunjungi masyarakat.

SASARAN 4

Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik sektoral

INDIKATOR: PERSENTASE ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) YANG MENGGUNAKAN DATA STATISTIK DALAM MENYUSUN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dengan target kinerja 100% telah Berhasil mencapai realisasi kinerja 100% atau mencapai **100,00%**. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

Berdasarkan hasil evaluasi program/kegiatan pada sasaran 4 (empat) tersebut di atas, ada upaya-upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk pencapaian kinerja tahun berikutnya, yaitu:

1. Terus meningkatkan pengembangan aplikasi SIPBM berbasis android.
2. Memperkuat dan meningkatkan koordinasi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah, Kelurahan dan Desa menuju Kabupaten Bone Satu Data.

SASARAN 4

Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Informasi dan Aspirasi Publik

INDIKATOR: INDEKS KEAMANAN INFORMASI

Dengan target kinerja 584 telah Berhasil mencapai realisasi kinerja 585 atau mencapai **100,17%**. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.

Berdasarkan hasil evaluasi program/kegiatan pada sasaran 5 (lima) tersebut di atas, ada upaya-upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk pencapaian kinerja tahun berikutnya, yaitu:

1. Pemenuhan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan mumpuni di bidang persandian melalui pelatihan ataupun bimbingan teknis khususnya jabatan fungsional sandiman.
2. Pemenuhan peralatan pengamanan teknologi informatika dan persandian pada ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Bone.

B. REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran belanja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Tahun 2022 sebelum perubahan sebesar Rp. 6.718.033.900 (Enam milyar tujuh ratus delapan belas juta tiga puluh tiga ribu Sembilan ratus rupiah) dan setelah perubahan menjadi Rp 7.609.243.699 (Tujuh milyar enam ratus sembilan juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 7.427.506.581 (Tujuh milyar empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus enam ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah) atau sebesar 97,61%



Dokumen Digital | REALISASI ANGGARAN | 2021

Uraian realisasi anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat lebih jelas pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tahun 2022

Uraian	Jumlah (Rp)		%
	Anggaran	Realisasi	
Meningkatkan Implementasi Tekbologi Infromasi dalam Menjaga Keamanan Data Komunikasi dan Penyebarluasan Informasi			
Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.164.344.359	5.017.216.227	97,15
Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Informasi dan Aspirasi Publik			
Program Informasi dan Komunikasi Publik	625.940.740	599.311.954	95,75
Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan E-Government			
Program Aplikasi Informatika	1.692.128.000	1.691.733.500	99,98
Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik sektoral			
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	81.045.050	77.587.850	95,73
Meningkatnya Keamanan Informasi			
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	45.785.550	41.657.050	90,98
Total	7.609.243.699	7.427.506.581	97,61

Sumber Data: Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

04 PENUTUP



LAMPIRAN



KENDALA PELAKSANAAN DAN UPAYA MENGATASI



SIMPULAN UMUM

RAPAT EVALUASI KINERJA

Rapat Evaluasi Kinerja merupakan agendarutin Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone yang dilakukansetiap triwulan dan akhir tahun berjalan. Kegiatanini merupakan media bagi pimpinanuntuk melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Selain itu jugamenjadi bahan evaluasi bagi seluruh aparatuntuk melakukan perbaikan di masa mendatang.



A. SIMPULAN UMUM

Pencapaian kinerja merupakan perwujudan sinergi seluruh jajaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dalam menghadapi berbagai tantangan di tahun 2022. Namun demikian, upaya penyempurnaan dan perbaikan indikator kinerja harus terus dilakukan melalui penetapan indikator kinerja yang lebih berkualitas dengan target yang menantang. Selain itu, setiap risiko yang berpotensi menghambat pencapaian kinerja harus dapat diidentifikasi dan dimitigasi. Pencapaian Kinerja tersebut diwujudkan melalui Laporan Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Tahun 2022 dan merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban kinerja yang telah ditetapkan oleh organisasi dan menjadi salah satu bahan evaluasi atas sasaran yang ingin dicapai dalam dokumen perencanaan strategis 2018-2023. Rata-rata capaian kinerja berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja dengan target kinerja tahun 2022 berada pada angka 106,60 dengan kategori "Berhasil".

Selama periode pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2018-2023, selama 4 (empat) tahun pelaksanaannya, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone telah melakukan berbagai upaya perbaikan dengan melihat berita acara hasil reuvi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone tahun sebelumnya, namun tidak dapat dipungkiri masih terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan dalam melaksanakan kinerja yang telah direncanakan.

Secara umum dalam mendukung pencapaian sasaran, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone pada tahun 2022 mendapatkan alokasi dana APBD sebesar 7.609.243.699 (Tujuh milyar enam ratus sembilan juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah), dengan terealisasi per 30 Desember 2022 sebesar Rp. 7.427.506.581 (Tujuh milyar empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus enam ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah) atau sebesar 97,61%.

B. KENDALA PELAKSANAAN DAN UPAYA MENGATASI

Selama periode pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2018-2023, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone telah melakukan berbagai upaya perbaikan dengan melihat referensi dari hasil reuvi internal Inspektorat Kabupaten Bone.

Meskipun demikian masih terdapat beberapa kendala dalam melaksanakan kinerja yang telah direncanakan, antara lain:

- Kurangnya sumber daya manusia yang handal dalam mendukung pelaksanaan kegiatan terkait konten publikasi, informasi kehumasan, layanan informasi publik, pengelolaan website, pengamanan jaringan dan aplikasi.
- Kurangnya sarana dan prasarana kerja dalam menunjang produktifitas kegiatan bidang komunikasi informatika, persandian maupun statistik.
- Masih adanya yang terlambat dalam menyampaikan capaian kinerja triwulanan beserta data dukung yang valid dan up to date untuk bahan pemenuhan data capaian dan data dukung laporan kinerja yang dibutuhkan setiap tahun.
- Laporan capaian kinerja yang disampaikan oleh Bidang rata-rata belum dilengkapi dengan analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan serta rencana tindak lanjut.

- Belum optimalnya fasilitas teknologi informasi dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan pengelolaan data statistik sektoral.
- Belum optimalnya peralatan dan pemahaman serta pengawasan terhadap sistem manajemen keamanan informasi dan persandian daerah.

Dengan adanya kendala-kendala dia atas, maka perlu dilakukan upaya yang dapat mendorong peningkatan kinerja ke depan, antara lain:

- Memanfaatkan sumber daya yang ada dengan semaksimal mungkin dan mendorong aparat pengelola untuk meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan urusan Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian melalui pelatihan dan bimbingan.
- Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang produktifitas kegiatan bidang komunikasi informatika, persandian maupun statistik melalui pengadaan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran.
- Mendorong setiap bidang agar dapat menyampaikan capaian kinerja triwulanan beserta data dukung yang valid dan up to date agar tidak terjadi keterlambatan pemenuhan data capaian dan data dukung laporan kinerja yang dibutuhkan setiap tahun.
- Capaian kinerja yang disampaikan oleh semua bidang setiap bulan hendaknya disertai dengan analisis keberhasilan atau kegagalan atas capaian yang telah dilaksanakan serta rencana tindak lanjutnya untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi bulan berikutnya.
- Menyusun rencana pemenuhan fasilitas teknologi informasi pendukung SPBE dan pengelolaan statistik sektoral melalui telaahan staf.
- Optimalisasi peralatan melalui pengadaan dan peningkatan pemahaman serta pengawasan terhadap sistem manajemen keamanan informasi dan persandian daerah.
- Pemberian Reward kepada ASN dan Non ASN yang berprestasi dan berkontribusi dalam peningkatan capaian kinerja OPD.

LAMPIRAN

Dokumen Digital | DATA DUKUNG SAKIP | 2022



Dokumen Digital | DATA DUKUNG LAIN | 2021

EDISI | FEBRUARI, 2023